



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



Jl. K.H. Abdul Kadir Kasim, Parappa, Bontoharu
Tlp/Fax : 0414-2313041
www.dinkeskepulauanseyarkab.go.id
mswordcoverpages.com

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah Laporan kinerja ini menjadi wujud komitmen kami untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kami semua agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami.

Ucapan terima kasih atas dedikasi, kerja keras dan semangat pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan laporan ini. Baik itu para penyelenggara program, pelaksana kegiatan, pihak terkait maupun masyarakat yang turut serta aktif dalam mendukung berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan.

Akhir kata, kami berharap LAKIP ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja kami dan menjadi landasan untuk perbaikan di masa mendatang. Kritik dan saran yang membangun selalu kami terima dengan tangan terbuka guna menciptakan pelayanan yang lebih baik lagi.

Benteng, 03 Februari 2025,

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

dr. H. HUSAINI, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum OPD.....	2
D. Isu-Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Rencana Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja Utama Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar		Halaman
1.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	5

DAFTAR GRAFIK

No. Grafik		Halaman
3.1	Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	34
3.2	Angka Kematian Ibu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	36
3.3	Angka Kematian Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	37
3.4	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	38
3.5	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	40
3.6	<i>Treatment Success Rate</i> Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	41
3.7	Desa/Kelurahan UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	43
3.8	Persentase Pelayanan Hipertensi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	44
3.9	Persentase Rumah Tangga BerPHBS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	46
3.10	Persentase UKBM Aktif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	47

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026	19
2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026	22
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	26
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2024	27
3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2024	31
3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	33
3.3	Program Pendukung Capaian Indikator Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2024	35
3.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja AKI Tahun 2024	36
3.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja AKB Tahun 2024	38
3.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2024	39
3.7	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2024	40
3.8	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja Pengobatan Pasien TB semua tipe Tahun 2024	42
3.9	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Desa/Kelurahan UCI Tahun 2024	43
3.10	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Hipertensi Tahun 2024	45

3.11	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga ber-PHBS Tahun 2024	46
3.12	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase UKBM Aktif Tahun 2024	48
3.13	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	48
3.14	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Tahun 2024	49
3.15	Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
3.16	Realisasi Pagu Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
3. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.
4. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
5. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan di latar belakang hal-hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan salah satu media informasi pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah diberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota. Untuk terselenggaranya pemerintah yang baik, maka perlu didukung oleh kinerja yang baik dan efisien, memenuhi tertib administrasi pemerintahan, penetapan otonomi daerah yang berlandaskan kepada pembagian tugas dan fungsi,

wewenang, tanggung jawab yang jelas diantara semua tingkat pemerintahan.

Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Selayar Tahun 2021 – 2026 yang merupakan arah dan pedoman di dalam penyelenggaraan pembangunan sektor kesehatan. Dimana Renstra tersebut mengacu pada Visi Misi dan Program Strategik Bupati Kepulauan Selayar periode 2021-2026.

Kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tertuang dalam Perda Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar dan Perda Nomor 04 Tahun 2020 tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom.

Demikian pula Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

1. Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas

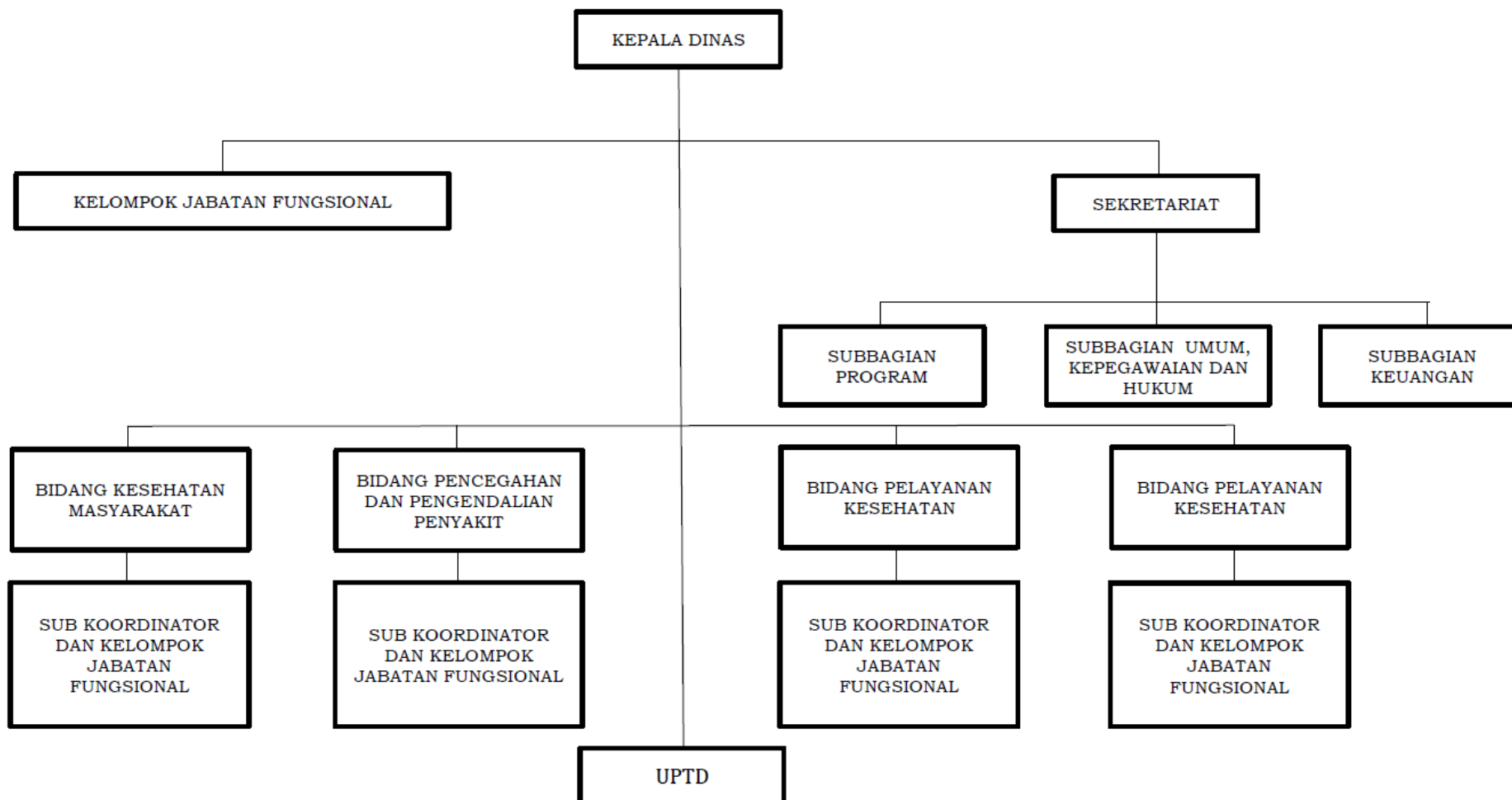
a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- 5) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar



b. Tugas Pokok dan Fungsi

Kebijakan yang mengatur tentang Perangkat Daerah, Kedudukan serta Tugas Pokok dan Fungsinya adalah Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan Dipimpin Oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organisasi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan Tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- i. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan;
- j. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas di dukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari:

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan Tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi :

- a. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas.
- b. Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- c. Pengordinasian urusan umum, hukum, dan kepegawaian.
- d. Pengordinasian pengelolaan keuangan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada semua unsur pada Dinas;
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program/kegiatan bidang kesehatan;

- i. Melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang kesehatan;
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- k. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. Melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program/kegiatan bidang kesehatan;
- n. Melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. Memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- h. Menyusun program dan kegiatan Dinas dalam dokumen perencanaan;
- i. Menyusun dokumen evaluasi Dinas;
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan;
- l. Memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang kesehatan;
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- r. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset, pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. Mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;

- m. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. Melaksanakan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- o. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- q. Melaksanakan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- r. Melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- s. Melaksanakan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- t. Memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- v. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- j. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- k. Menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l. Menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
- m. Menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

- o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang kesehatan masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

7) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit. Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Perumusan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- b. Pelaksanaan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

8) Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan rujukan, serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu. Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan adalah:

- a. Perumusan teknis bidang pelayanan kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

9) Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sumber daya kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

10) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

D. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka Isu Strategis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Pencegahan dan pengendalian pandemi kesehatan.
4. Pencapaian SPM dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita Stunting.
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
7. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah bentuk operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih. Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2026, Kepala Daerah terpilih telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai yaitu *“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*.

1. Visi

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026 yaitu

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 (dua) pokok visi yakni *“Bandar Maritim”* dan *“Kawasan Timur Indonesia”*. Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

- a. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki logistik khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan logistik; dan
- b. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

2. Misi

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan;
- c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
- d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan;
- e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan;
- f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelayanan Dinas Kesehatan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2021 – 2026, yaitu :

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pelayanan Dinas Kesehatan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan **tujuan ke-1** : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan **sasaran ke-1**, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1).

Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pelayanan Dinas Kesehatan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-3, terkait dengan **tujuan ke-4** : meningkatkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia (T-4) dengan **sasaran ke-4**, yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia (S-4).

Tabel 2.1**Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026**

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1. Meningkatnya efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, penguatan sistem kelembagaan dan pengawasan, dan meningkatnya inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Perdesaan		
2. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan.	2. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan dan kualifikasi desa.
	3. Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan.	3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lokal dalam rangka mengembangkan lapangan kerja dan lapangan usaha di perdesaan.
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
3. Meningkatkan Fasilitas pembangunan sumber daya Manusia	4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat	4. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan Pendidikan dan Kesehatan
	5. Meningkatnya daya beli Masyarakat	5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
4. Mengoptimalkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia	6. Meningkatnya usaha perikanan	6. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan, penciptaan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	7. Meningkatnya Usaha Pariwisata	7. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan, daya Tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi, dan sumberdaya manusia pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi
	8. Meningkatnya usaha industri, transportasi dan perdagangan	8. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana pengembangan industry, peningkatan akses transportasi dan infrastruktur Pelabuhan, dan akselerasi perdagangan dalam dan luar wilayah melalui Kerjasama antar daerah
Misi 5 : Meningkatnya Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan		
5. Meningkatnya aktualisasi nilai budaya 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	9. Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial 10. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	9. Meningkatkan peran Lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan daerah
Misi 6 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		
7. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	11. Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

Sumber : RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan misi pertama pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan adalah **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**, dengan indikator tujuan adalah **Angka Harapan Hidup**.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup	68,46	68,97	69,23	69,48	69,74	70
		Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	324 /100.000 KH	190 /100.000 KH	180 /100.000 KH	170 /100.000 KH	160 /100.000 KH	150 /100.000 KH
			Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	3,7 /1000 KH	4,4 /1000 KH	4,3 /1000 KH	4,2 /1000 KH	4,1 /1000 KH	4 /1000 KH
			Prevalensi Balita Gizi Kurang	0	4%	3,5%	3%	2,5%	2%
			Persentase Balita Gizi Buruk	0,09 %	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,5 %	0,4 %
			Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (<i>succes rate</i>)	0	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
			Persentase Desa/Kelurahan UCI	85,2	85 %	90 %	95 %	90 %	100 %
			Persentase Pelayanan Hipertensi	93	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Rumah Tangga BerPHBS	0	67 %	69 %	71 %	73 %	75 %
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Persentase UKBM Aktif	0	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Kesehatan							
2.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	0	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai Sakip OPD	0	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (B)	75,00 (B)	80,00 (B)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00
			Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	0	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber: Perubahan Renstra Dinkes 2021-2026

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Pembangunan Puskesmas
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
	Pengembangan Puskesmas
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Pengembangan Rumah Sakit

	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Operasional Pelayanan Puskesmas
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

B. Rencana Kinerja

1. Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ditetapkan 2 Sasaran yang memuat 9 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	170/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH	4,2/1.000 KH
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	3
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,6
		Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (<i>succes rate</i>)	90
		Persentase Desa/Kelurahan UCI	95
		Persentase Pelayanan Hipertensi	100
		Persentase Rumah Tangga BerPHBS	71
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKM Aktif	100

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.579.824.700
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 86.430.339.993
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 6.941.114.000
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 263.401.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 6.500.000

Sumber: Subbagian Program Dinas Kesehatan, 2024

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup	69,48	(Jumlah angka usia harapan hidup/ Jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu Tahun tertentu x 100)	BPS
		Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	170/100.000 KH	(Jumlah Kematian Ibu Hamil, bersalin dan nifas dalam satu Tahun / Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama x 100.000)	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	4,2/1.000 KH	(Jumlah kematian anak usia kurang dari satu Tahun (Bayi) dalam satu Tahun / Jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama x 1.000)	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Prevalensi Balita Gizi Kurang	3 %	(Jumlah kasus Gizi kurang yang ditemukan / Jumlah balita yang ada x 100)	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase Balita Gizi Buruk	0,6 %	(Jumlah kasus Gizi Buruk yang ditemukan / Jumlah balita yang ada x 100)	Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase Keberhasilan Pengobatan	90 %	(Jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan	Bidang Pencegahan

			Pasien TB semua tipe (<i>succes rate</i>)		lengkap / Jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati pada kohort yang sama x 100)	dan Pengendalian Penyakit
			Persentase Desa/Kelurahan UCI	95 %	(Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumlah desa/kelurahan di suatu wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama x 100)	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Persentase Pelayanan Hipertensi	100 %	(Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama x 100)	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Persentase Rumah Tangga BerPHBS	71 %	(Jumlah Rumah Tangga BerPHBS di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh Rumah Tangga yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100)	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	100 %	(Jumlah UKBM Aktif di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh UKBM yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100)	Bidang Kesehatan Masyarakat

Sumber: Perubahan Renstra Dinkes Tahun 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (*Planning*) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD, Rencana Aksi Kinerja maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dan kemudian pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi *controlling*.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Didalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk melihat/mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan, dengan berbagai piranti perencanaan berupa Pengukuran Kinerja.

A. Capaian Kinerja Utama Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini menjelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan

kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan daerah, Pemberian Skala Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah adalah sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	69,48	73,48	105,7	
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	170/100.000 KH	286,7/100.000 KH	31,35	
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	4,2/1.000 KH	9,7/1.000 KH	-30,95	
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	3 %	7,32 %	-44	
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,6 %	1,13 %	11,67	
		Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (<i>success rate</i>)	90 %	67,85 %	75,39	
		Persentase Desa/Kelurahan UCI	95 %	86,4 %	90,95	
		Persentase Pelayanan Hipertensi	100 %	100 %	100	
		Persentase Rumah Tangga BerPHBS	71 %	79,7 %	112,2	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	100 %	98,4 %	98,4	

Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dari capaian kinerja 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan kriteria penilaian hasil realisasi kinerja sangat tinggi dan tinggi yang memiliki gradasi nilai menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan kinerja yaitu:
 - a. Indikator Angka Usia Harapan Hidup dengan target kinerja 69,48 terealisasi 73,48 dengan capaian sebesar 105,7 % dengan kriteria sangat tinggi;
 - b. Indikator Persentase Rumah Tangga BerPHBS dengan target kinerja 71% terealisasi 79,7 % dengan capaian sebesar 112,2 % dengan kriteria sangat tinggi;
 - c. Indikator Persentase Pelayanan Hipertensi dengan target kinerja 100 % terealisasi 100 % dengan capaian sebesar 100 % dengan kriteria sangat tinggi;
 - d. Indikator Persentase UKBM Aktif dengan target kinerja 100 % terealisasi 98,4 % dengan capaian sebesar 98,4 % dengan kriteria sangat tinggi;
 - e. Indikator Persentase Desa/Kelurahan UCI dengan target kinerja 95 % terealisasi 86,4 % dengan capaian sebesar 90,95 % dengan kriteria tinggi;
 - f. Indikator Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (*success rate*) dengan target kinerja 90 % terealisasi 67,85 % dengan capaian sebesar 75,39 % dengan kriteria tinggi.
2. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan kriteria penilaian hasil realisasi kinerja sangat rendah yang memiliki gradasi nilai menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal capaian kinerja yang diharapkan, yaitu:

- a. Indikator Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH dengan target kinerja 170/100.000 KH terealisasi 286,7/100.000 KH dengan capaian sebesar 31,35 % dengan kriteria sangat rendah;
- b. Indikator Persentase Balita Gizi Buruk dengan target kinerja 0,6 % terealisasi 1,13 % dengan capaian sebesar 11,67 % dengan kriteria sangat rendah;
- c. Indikator Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH dengan target kinerja 4,2/1.000 KH terealisasi 9,7/1.000 KH dengan capaian sebesar -30,95 % dengan kriteria sangat rendah;
- d. Indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang dengan target kinerja 3 % terealisasi 7,32 % dengan capaian sebesar -44 % dengan kriteria sangat rendah.

2. Membandingkan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara target dengan capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dengan target dan capaian tahun sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
			2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	73,05	73,27	73,48
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	151	317	286,7
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH	6,1	14,8	9,7
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	4,7	6,2	7,32
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,6	1,4	1,13
		Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (<i>success rate</i>)	71,7	59,1	67,85
		Persentase Desa/Kelurahan UCI	84,1	93,2	86,4
		Persentase Pelayanan Hipertensi	100	100	100
		Persentase Rumah	95,9	65,6	79,7

		Tangga BerPHBS			
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	98	95,8	98,4

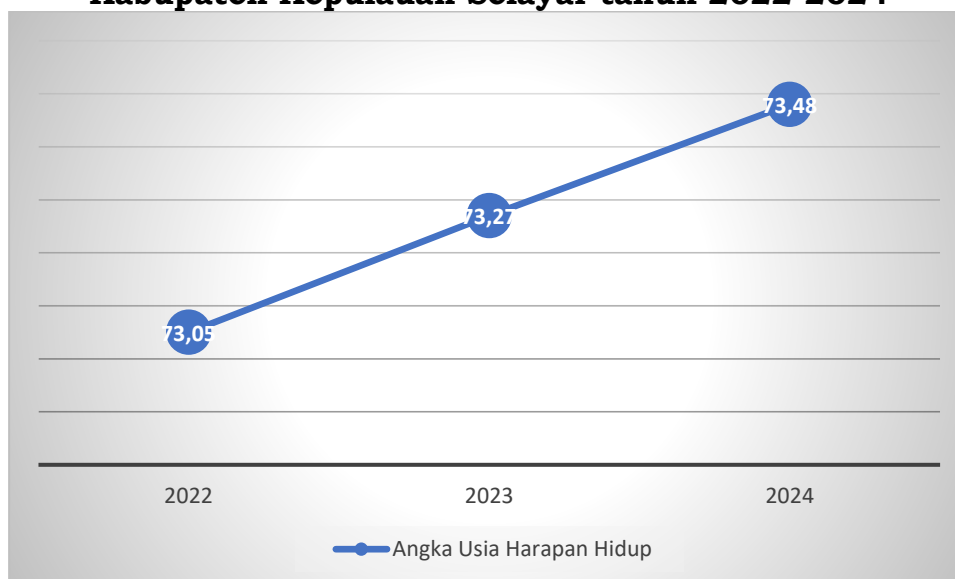
Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Usia Harapan Hidup mencerminkan derajat Kesehatan suatu masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar 73,48 tahun. Artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 73,48 tahun.

Grafik 3.1
Perkembangan Usia Harapan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022-2024



Sumber: BPS Selayar Tahun 2024

Pada tahun 2024 capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kepulauan Selayar meningkat 0,21 poin dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kemauan yang keras dan kemampuan hidup sehat.

Kondisi ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya UHH di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.3
Program Pendukung Capaian Indikator
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	76.484.993.088	59.926.593.762	82,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.948.365.000	5.315.773.700	76,50
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	263.401.000	237.161.800	90,04
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.500.000	0,00	0,00

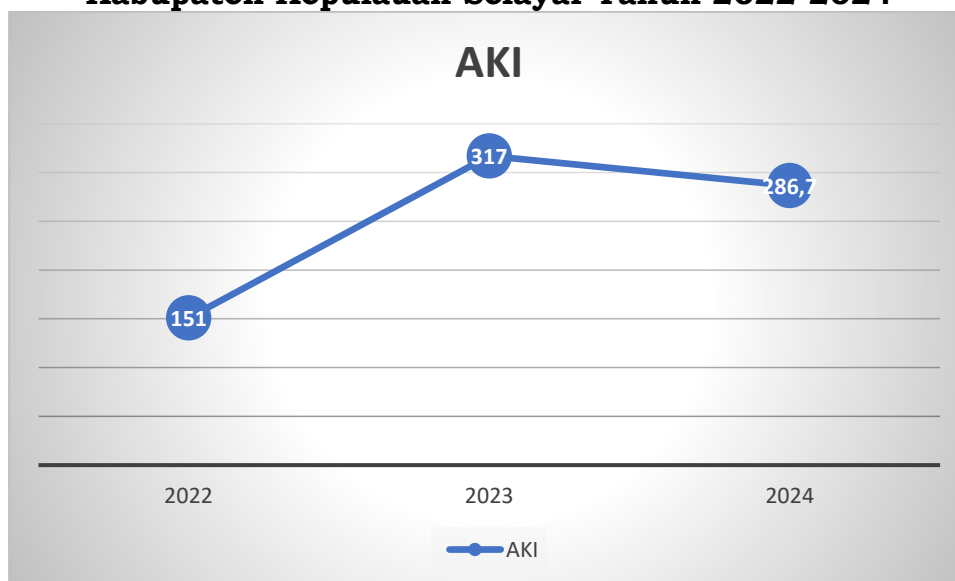
b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Disebut demikian karena AKI dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas layanan kesehatan.

Kematian Ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu pada masa kehamilan, bersalin atau nifas, bukan karena kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2
Angka Kematian Ibu
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Dari grafik dapat di jelaskan bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi, tahun 2022 yaitu 151 per 100.000 Kelahiran Hidup (3 kasus), tahun 2023 meningkat menjadi 317 per 100.000 Kelahiran Hidup (6 kasus) dan di tahun 2024 menurun menjadi 286,7 per 100.000 Kelahiran Hidup (5 kasus). Dan jika dibandingkan dengan target nasional maka angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Selayar belum memenuhi target nasional yaitu dibawah 183 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Capaian Indikator Kinerja AKI
Tahun 2024

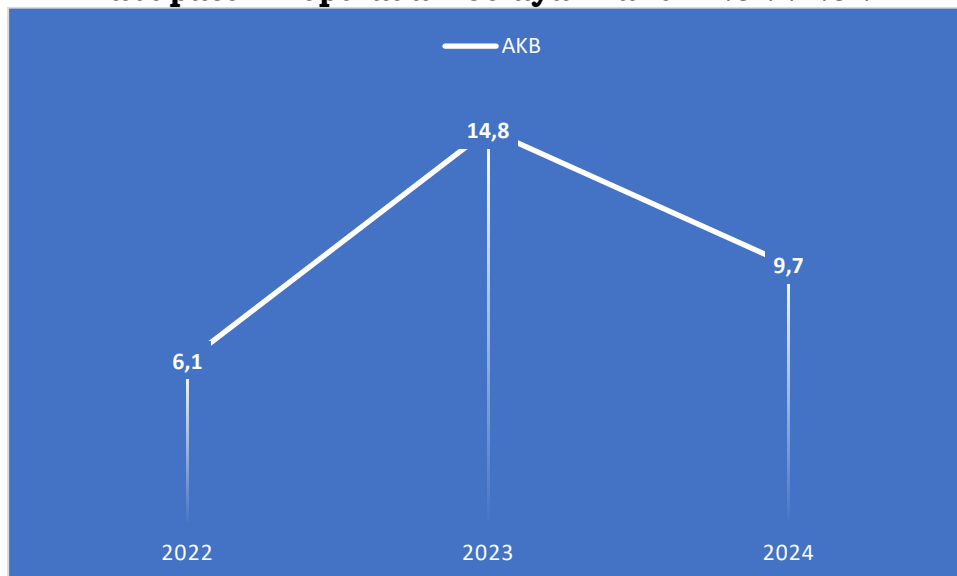
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.481.318.300	6.667.041.247	78,61
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.481.318.300	6.667.041.247	78,61
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	501.705.000	490.069.000	97,68
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	138.837.000	120.330.000	86,67
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25

c. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama. AKB merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.

Grafik 3.3
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi, dimana jumlah tahun 2022 sebanyak 12 kasus (6,1 per 1.000 Kelahiran Hidup), tahun 2023 sebanyak 28 kasus (14,8 per 1.000 Kelahiran Hidup) dan tahun 2024 sebanyak 17 kasus (9,7 per 1.000 Kelahiran Hidup). Dan jika dibandingkan dengan target nasional

maka angka kematian bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi target nasional yaitu dibawah 16 per 1.000 Kelahiran Hidup.

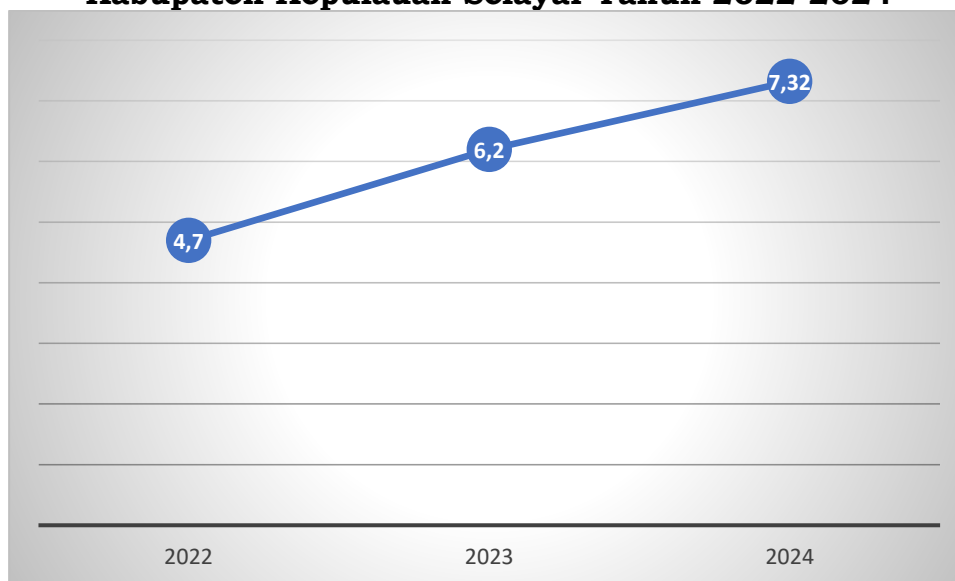
Tabel 3.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Capaian Indikator Kinerja AKB
Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25

d. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang merupakan kondisi dimana berat badan balita kurang dari berat badan normal anak seusianya. Standar berat badan normal mengacu pada standar status gizi anak menurut *World Health Organization* (WHO). Pencapaian kinerja prevalensi balita gizi kurang dihitung berdasarkan jumlah balita gizi kurang dibagi total balita yang ada dalam kurun satu tahun dikali 100%.

Grafik 3.4
Prevalensi Balita Gizi Kurang
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Selama periode 2022 hingga 2024, prevalensi balita gizi kurang mengalami peningkatan, mencerminkan program gizi dan pencegahan gizi kurang yang telah diimplementasikan belum optimal. Peningkatan yang terjadi selama periode tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya, termasuk program gizi dan kebijakan pencegahan gizi kurang belum memberikan dampak positif yang signifikan.

Tabel 3.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Capaian Indikator Kinerja
Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.339.997.300	6.765.251.247	72,43
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.339.997.300	6.765.251.247	72,43
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.499.221.000	708.609.000	47,27
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25

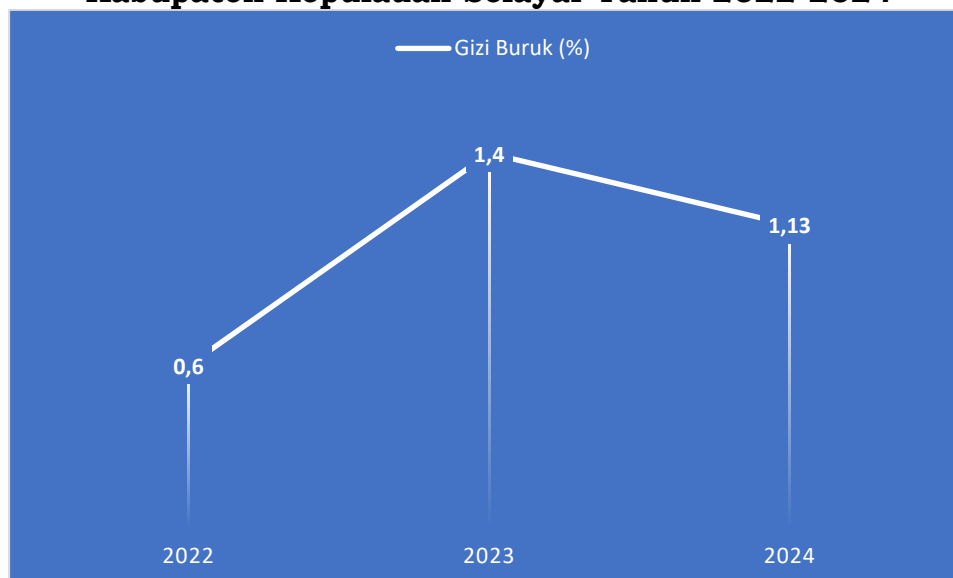
e. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau yang seringkali ditemukan dalam istilah malnutrisi, merupakan kondisi serius, dimana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Tentunya, kondisi ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Berdasarkan data Berdasarkan Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI,2022), prevalensi gizi buruk di Indonesia saat ini menjadi 7,7%, dimana kasus gizi buruk ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan prevalensi 7,1% pada tahun 2021.

Gizi buruk berbeda dengan *stunting*. Gizi buruk ditandai dengan badan anak yang terlalu kurus dibandingkan tinggi badannya. Sedangkan *stunting* ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Jika sebelumnya pengertian gizi buruk secara umum dapat diartikan sebagai kondisi serius. Dimana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang

semestinya diperlukan. Maka, gizi kurang sendiri dapat diartikan lebih spesifik sebagai kondisi dimana nutrisi tidak dipenuhi dengan baik.

Grafik 3.5
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Selama periode 2022 hingga 2024, persentase balita gizi buruk mengalami fluktuasi, mencerminkan program gizi dan pencegahan gizi buruk yang telah diimplementasikan belum optimal. Peningkatan yang terjadi selama periode tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya, termasuk program gizi dan kebijakan pencegahan gizi buruk belum memberikan dampak positif yang signifikan.

Tabel 3.7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Capaian Indikator Kinerja
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2024

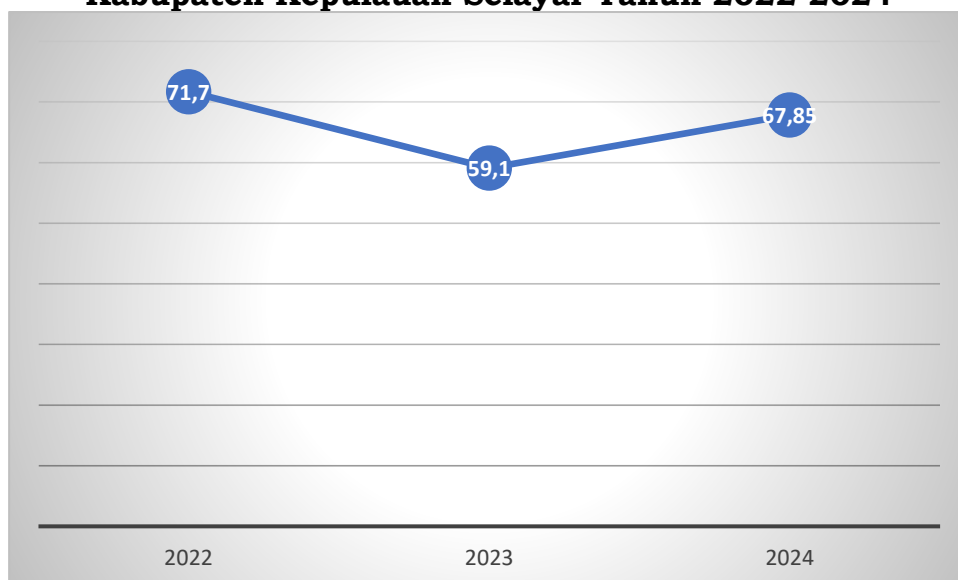
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.339.997.300	6.765.251.247	72,43
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.339.997.300	6.765.251.247	72,43
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.499.221.000	708.609.000	47,27
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25

f. Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (*success rate*)

Tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks *Mycobacterium Tuberculosis* yang ditularkan melalui dahak (droplet) dari penderita TBC kepada individu lain yang rentan.

Angka keberhasilan pengobatan TB (*Success Rate*) adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan, penderita TB yang ditemukan dan diobati pada kurun waktu 10 – 15 bulan yang lalu (menurut Buku Pedoman Nasional Penanggulangan TB).

Grafik 3.6
Treatment Success Rate
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (*success rate*) di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Realisasi persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (*success rate*) pada tahun 2024 belum mencapai target yaitu 67,86 dengan persentase capaian sebesar 75,39.

Tabel 3.8
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Capaian Indikator Kinerja
Pengobatan Pasien TB semua tipe Tahun 2024

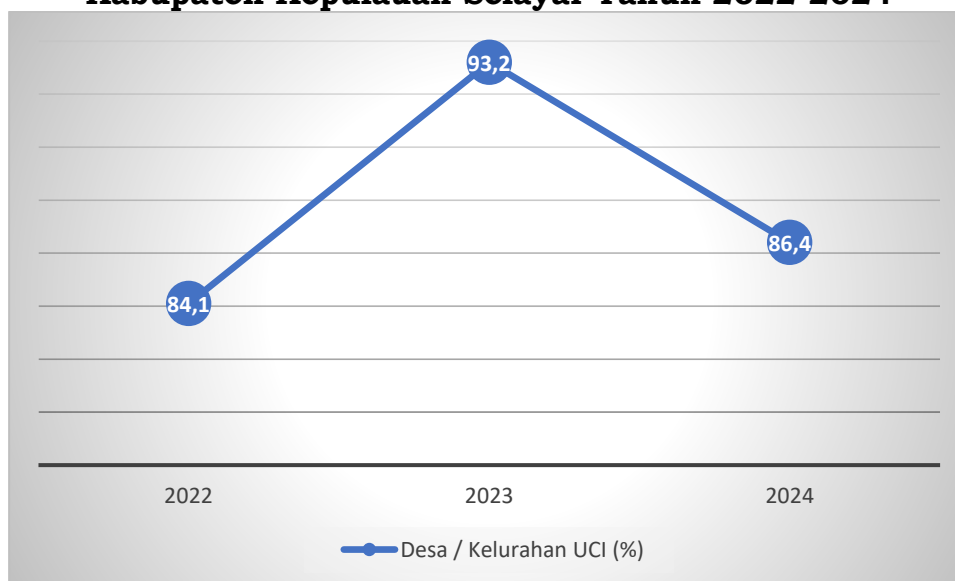
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.216.021.300	7.339.913.799	79,64
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.216.021.300	7.339.913.799	79,64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	300.650.000	263.296.300	87,58
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.074.595.000	1.019.975.252	94,92
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25

g. Persentase Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Pelayanan imunisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). UCI (*Universal Child Immunization*) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan program imunisasi.

Indikator *Universal Child Immunization* (UCI) menunjukkan desa/kelurahan yang 80% anak di desa tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat (*Herd Immunity*) terhadap penularan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi).

Grafik 3.7
Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Realisasi persentase Desa/Kelurahan UCI pada tahun 2024 belum mencapai target yaitu 86,4 dengan persentase capaian sebesar 90,95.

Tabel 3.9
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Capaian Indikator Kinerja
Persentase Desa/Kelurahan UCI Tahun 2024

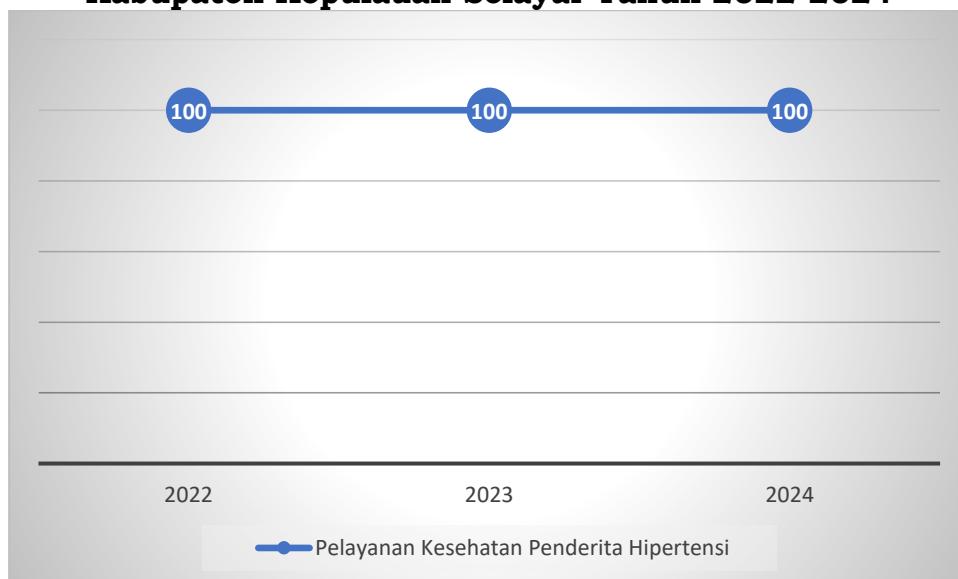
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.998.969.300	6.173.132.247	77,17
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.998.969.300	6.173.132.247	77,17
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	158.193.000	116.490.000	73,64
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25

h. Persentase Pelayanan Hipertensi

Hipertensi merupakan salah satu penyakit Kronis dan Degeneratif lainnya yang menjadi bagian dari masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Hipertensi menjadi salah satu faktor risiko pintu masuk berbagai penyakit Degeneratif antara lain penyakit Jantung Koroner, Stroke dan penyakit Pembuluh Darah lainnya yang berakibat pada tingginya pembiayaan kesehatan dan risiko kematian.

Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Grafik 3.8
Persentase Pelayanan Hipertensi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Selama periode 2022 hingga 2024, pelayanan kesehatan penderita hipertensi menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Pada setiap tahunnya, dari 2022 hingga 2024, penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.10
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Capaian Indikator Kinerja
Persentase Pelayanan Hipertensi Tahun 2024

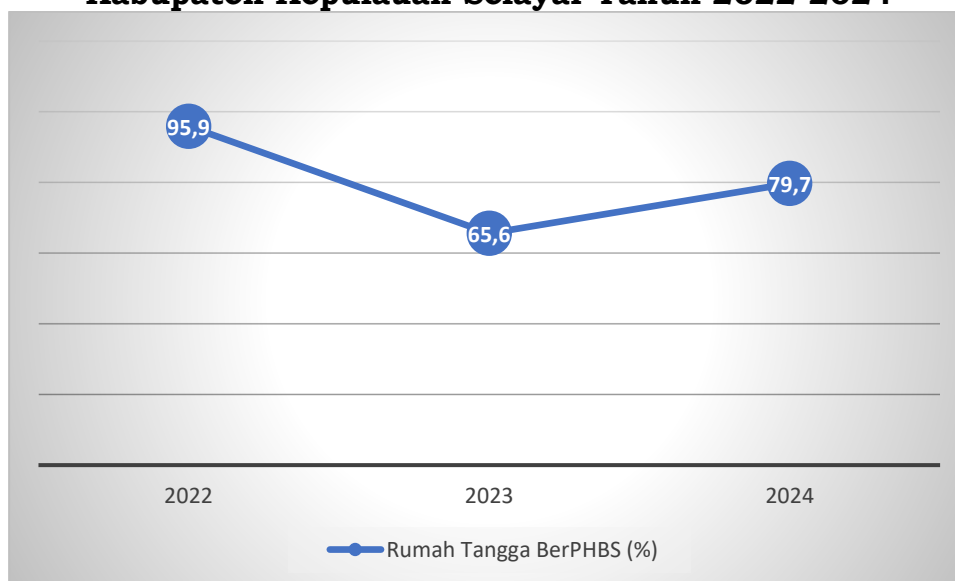
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.915.371.300	7.076.617.499	79,37
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.915.371.300	7.076.617.499	79,37
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.074.595.000	1.019.975.252	94,92
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25

i. Persentase Rumah Tangga BerPHBS

PHBS merupakan kependekan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Adapun 10 (sepuluh) indikator PHBS yaitu sebagai berikut:

- 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
- 2) Memberi bayi ASI eksklusif
- 3) Menimbang bayi dan balita
- 4) Menggunakan air bersih
- 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- 6) Menggunakan jamban sehat
- 7) Memberantas jentik di rumah
- 8) Makan buah dan sayur setiap hari
- 9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari
- 10) Tidak merokok di dalam rumah

Grafik 3.9
Persentase Rumah Tangga BerPHBS
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuatif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Realisasi persentase rumah tangga ber-PHBS pada tahun 2024 mencapai target yaitu 79,7 dengan persentase capaian sebesar 112,2.

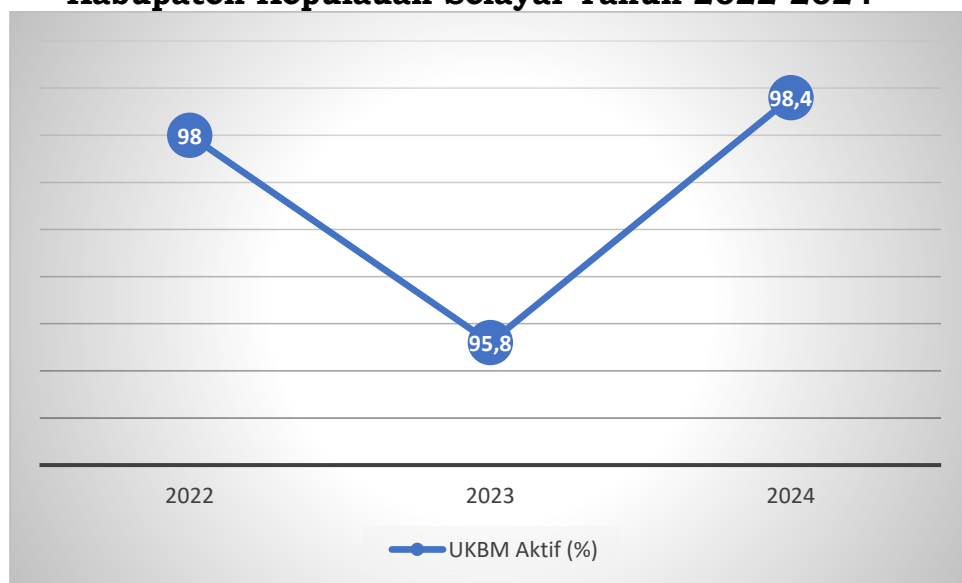
Tabel 3.11
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Capaian Indikator Kinerja
Persentase Rumah Tangga ber-PHBS Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25

j. Persentase UKBM Aktif

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah suatu upaya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Beberapa bentuk UKBM yang dikenal adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin desa) dan Desa Siaga.

Grafik 3.10
Persentase UKBM Aktif
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase UKBM aktif di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuatif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Realisasi persentase UKBM aktif pada tahun 2024 belum mencapai target yaitu 98,4 dengan persentase capaian sebesar 98,4.

Tabel 3.12
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pendukung Capaian Indikator Kinerja
Persentase UKBM Aktif Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Panjang Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
1.	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	70	73,48	104,9
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	150	286,7	8,87
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	4	9,7	-42,5
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	2	7,32	-166
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,4	1,13	-82,5
		Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (<i>succes rate</i>)	90	67,85	75,39
		Persentase Desa/Kelurahan	100	86,4	86,4

		UCI			
		Persentase Pelayanan Hipertensi	100	100	100
		Persentase Rumah Tangga BerPHBS	75	79,7	106,2
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	100	98,4	98,4

Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Standar Nasional
1.	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	73,48	74,15
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	286,7	183
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	9,7	16
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	7,32	-
		Persentase Balita Gizi Buruk	1,13	-
		Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (<i>succes rate</i>)	67,85	90%
		Persentase Desa/Kelurahan UCI	86,4	-
		Persentase Pelayanan Hipertensi	100	100
		Persentase Rumah Tangga BerPHBS	79,7	-
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	98,4	100

Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi Alternatif

a. Penyebab Keberhasilan

- Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya Usia Harapan Hidup.
- Pelaksanaan Aktifkan Posyandu dan Vaksinasi Bersama Mitra/ Kelompok Masyarakat.
- Pelaksanaan Upaya Deteksi Dini.
- Kampanye PHBS, Germas dan program Kesehatan lainnya.
- Adanya layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM).
- Penyebarluasan media informasi Kesehatan melalui media promosi Kesehatan.
- Adanya dukungan dana dari berbagai sumber anggaran untuk melaksanakan kegiatan PHBS (APBD dan DAK Non Fisik).

b. Penyebab Kegagalan

- Faktor adanya penyakit penyerta pada ibu hamil/ibu bersalin, misalnya perdarahan sehingga memperparah keadaan ibu hamil/ibu bersalin tersebut.
- Faktor usia pada ibu hamil/ ibu bersalin (terlalu muda atau terlalu tua) yang sangat berpengaruh pada kejadian komplikasi ibu hamil/ ibu bersalin. Ini juga menjadi salah satu pentingnya menghindari 4T yaitu Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak anak dan Terlalu rapat jarak kelahiran.
- Masih tingginya kasus kasus BBLR, infeksi, asfiksia, kelainan kongenital serta pernikahan dini.
- Faktor sosial budaya yang belum sadar akan pentingnya pelayanan kesehatan bagi bayi.
- Balita yang mengidap penyakit cenderung mengalami gizi kurang.
- Stigmatisasi yang melahirkan diskriminasi terhadap pasien TBC muncul tidak hanya di masyarakat, tapi juga di lingkungan keluarga dan tenaga Kesehatan.

- Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan khususnya pada masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan.
- Ketidaktahuan akan resistansi TBC akibat putus obat.

c. Alternatif Solusi

- Memperkuat sistem jejaring rujukan ibu hamil/ibu bersalin dengan membuat MoU rujukan antara Dinas Kesehatan/Puskesmas dengan rumah sakit rujukan.
- Semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan ANC (*Antenatal Care*) standar terpadu minimal 6 kali (2 kali konsultasi dokter ahli).
- Pendampingan Ibu hamil, kasus gizi buruk dan bumil KEK, ASI Eksklusif oleh tenaga bidan dengan melibatkan kader posyandu.
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
- Memberikan ASI eksklusif hingga usia anak 6 bulan, dilanjutkan dengan memberikan MPASI yang bergizi lengkap dan seimbang.
- Mengoptimalkan pemberian Tablet Fe pada remaja putri 12 – 18 tahun.
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan keagawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir.
- Mengoptimalkan pengawasan terhadap pasien TB.
- Pendekatan terpadu yang melibatkan edukasi pasien, dukungan psikososial, dan keterlibatan keluarga dalam mendukung kepatuhan terhadap pengobatan TB.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya memberikan pandangan terhadap pengelolaan anggaran, tetapi juga berperan penting dalam mencapai sasaran strategis dan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Integritas dalam penggunaan sumber daya menjadi dasar bagi organisasi agar berkembang dengan efektif. Dalam rangka pencapaian tersebut, organisasi perlu memprioritaskan integritas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Analisis efisiensi tidak hanya menjadi alat untuk mengidentifikasi potensi penghematan, tetapi juga menjadi landasan untuk budaya organisasi yang berfokus

pada tanggung jawab, pencapaian sasaran dan keberlanjutan jangka panjang.

Berikut tabel analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.15
Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi
1.	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	9	49,42	88,42	-39
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	98,4	0	98,4
Jumlah		10	147,82	88,42	59,4

Sumber: Dinkes Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan capaian yang baik secara keseluruhan, terdapat potensi untuk lebih efisien dalam pengelolaan anggaran. Adanya pencapaian positif maka perlu dilakukan pemantauan dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran agar pencapaian tujuan strategis lebih optimal dan seimbang dengan alokasi sumber daya yang tersedia.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan alat penting untuk memberikan transparansi terhadap cara suatu organisasi menggunakan dana yang ditetapkan sehingga tercapai akuntabilitas bagi pihak yang berkepentingan. Realisasi pagu program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16
Realisasi Pagu Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.644.019.465	67.548.150.219	96,99
Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80.750.000	79.864.500	98,90
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.890.000	97,80
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	4.999.500	99,99
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.250.000	6.750.000	93,10
Koordinasi Dan Penyusunan DPA SKPD	5.000.000	4.950.000	99,00
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.500.000	58.275.000	99,62
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.632.421.865	65.641.114.341	97,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.609.670.000	65.620.377.541	97,06
pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	9.322.000	7.461.800	80,05
koordinasi dan Pelaksanaan angkutan SKPD	6.938.865	6.900.000	99,44
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.491.000	6.375.000	98,21
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101.600.000	101.550.000	99,95
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	101.600.000	101.550.000	99,95
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	9.870.000	98,70
Monitoring Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai	10.000.000	9.870.000	98,70
Administrasi Umum Perangkat Daerah	966.431.500	930.175.750	96,25
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.674.000	271.840.000	88,93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.379.500	17.167.950	88,59
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	3.840.000	3.840.000	100,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	20.712.000	20.712.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	616.826.000	616.615.800	99,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420.453.100	364.281.028	86,64
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.546.000	345.572.028	86,71
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.907.100	18.709.000	85,40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.363.000	421.294.600	97,44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.966.000	304.234.150	97,84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.397.000	117.060.450	96,43
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	76.484.993.088	62.719.467.762	82,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.649.021.740	24.960.943.545	93,67
Pembangunan Puskesmas	14.166.520.300	13.177.421.436	93,02
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.324.240.845	1.207.043.520	91,15
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4.374.567.500	4.168.015.340	95,28
Pengembangan Puskesmas	5.198.742.700	5.094.879.971	98,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	200.000.000	128.022.284	64,01

Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	178.585.000	171.305.000	95,92
Pengembangan Rumah Sakit	280.000.000	256.092.400	91,46
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	926.365.395	758.163.594	81,84
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.835.971.348	37.758.524.217	75,77
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	501.705.000	490.069.000	97,68
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	138.837.000	120.330.000	86,67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	120.000.000	119.849.000	99,87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	211.200.000	207.000.000	98,01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.710.000	4.770.000	37,53
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan OrangTerduga Tuberkulosis	300.650.000	263.296.300	87,58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	38.850.000	35.700.000	91,89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.499.221.000	708.609.000	47,27
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.335.102.748	5.149.106.818	81,28
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	89.998.800	89.998.600	100,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	158.193.000	116.490.000	73,64
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.074.595.000	1.019.975.252	94,92
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.977.970.000	22.842.027.800	73,74
Operasional Pelayanan Puskesmas	7.840.776.300	6.056.642.247	77,25
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	536.162.500	534.660.200	99,72
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.948.365.000	5.315.773.700	76,50
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.948.365.000	5.078.611.900	73,09
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.948.365.000	5.078.611.900	73,09
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	263.401.000	237.161.800	90,04
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	263.401.000	237.161.800	90,04
Pengedalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	263.401.000	237.161.800	90,04
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.500.000	0,00	0,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.500.000	0,00	0,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.500.000	0	0,00
TOTAL	153.347.278.553	135.583.391.681	88,42

Sumber: Subbagian Program Dinas Kesehatan, 2025

Capaian persentase anggaran yang telah terealisasi sebesar 88,42%. Capaian program tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu 96,99%. Sedangkan, rata-rata efisiensi keseluruhan program adalah 86,38% menunjukkan secara umum penggunaan anggaran hampir mencapai 86,38% dari pagu yang ditetapkan untuk setiap program.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian realisasi anggaran diantaranya adanya perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, hambatan dari aspek teknis atau logistik dan adanya keterlambatan pelaksanaan program. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi Kendal tersebut adalah:

1. Menyusun perencanaan yang lebih fleksibel untuk menanggapi perubahan situasi atau kebijakan
2. Menerapkan strategi pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan optimal;
3. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan mengambil langkahlangkah perbaikan;
4. Mengoptimalkan proses pelaksanaan dan melakukan monitoring secara aktif.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 sebanyak 4 (empat) indikator utama dikategorikan sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$).
2. Realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 135.583.391.681 atau 88,42% dari target alokasi anggaran sebesar Rp. 153.347.278.553.
3. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis adalah efisien karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya dan Dinas Kesehatan pada khususnya.

Benteng, 03 Februari 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005